



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

**RENCANA KERJA PERUBAHAN
(RENJA – SKPD)
INSPEKTORAT
KABUPATEN TAPIN TAHUN 2025**

**INSPEKTORAT
KABUPATEN TAPIN
2025**

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka menjamin akurasi kegiatan SKPD berjalan secara efektif dan efisien dan memiliki sasaran yang jelas dan dapat menjamin tercapainya tujuan yang ditetapkan maka diperlukan perencanaan Pengawasan yang baik. Perencanaan Pengawasan Daerah harus memiliki strategi sehingga perencanaan yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan dan dapat memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan pengawasan daerah yang berkesinambungan.

Memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat tahun 2025 maka perlu dilakukan Perubahan karena berdasarkan hasil evaluasi dalam tahun berjalan sampai dengan Triwulan II menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, antara lain :

1. Terdapat perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka pengawasan dalam rangka pembinaan di daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pengawasan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
2. Pergeseran pagu kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Inspektorat sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Tapin di bidang pengawasan daerah, maka dengan sendirinya Inspektorat mengemban tugas dan tanggung jawab agar proses pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berjalan dengan efisien, efektif, bersih serta dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka mewujudkan *Good Governance*, bebas dari unsur korupsi, kolusi dan nepotisme. Sehingga dapat mengarah pada visi, misi Kabupaten Tapin seperti yang diharapkan oleh semua pihak. Untuk mencapai strategi tersebut Inspektorat dituntut mampu menterjemahkannya kedalam berbagai bentuk kebijakan, program dan kegiatan pengawasan daerah.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Renja Perubahan Tahun 2025 SOPD Inspektorat sebagai berikut:

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II



- Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
 11. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 12. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41);
 13. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
 14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137);



15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4598); Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender DI Daerah;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6420);



24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
29. Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tatib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota;
31. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
33. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun



- 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 37. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402)
 38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021;
 39. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
 40. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2021) Nomor 31, Lembaran Negara Nomor 6633);
 41. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841)
 42. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 43. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 44. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2020 tentang Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 259);



45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450);
46. 39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
47. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
48. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
49. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
50. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
51. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
52. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
53. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nommor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 397);



54. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
55. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah;
56. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
57. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 16);
58. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 93);
59. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 Nomor 2);
60. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 71 Tahun 2023 tanggal 27 Juni 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD Tahun 2024 Provinsi Kalimantan Selatan).
61. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2023 Nomor 5);
62. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pengarustamaan Gender;
63. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapin 2014-2034 (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 10);
64. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 9);



65. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023;
66. Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin;
67. Peraturan Bupati Tapin Nomor 05 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026;
68. Peraturan Bupati Tapin Nomor 11 Tahun 2023 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Organisasi Inspektorat Kabupaten Tapin;

1.3 Maksud Dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Perubahan 2025 adalah sebagai pedoman arah kerja bagi Inspektorat Kabupaten Tapin. Kebijakan, program dan kegiatan disesuaikan antara program daerah, provinsi dan nasional sehingga pelaksanaan program pengawasan dan pembangunan akan semakin efektif dan efisien.

Adapun tujuan disusunnya Renja Perubahan adalah:

1. Sebagai panduan penyusunan rencana program/kegiatan tahunan sehingga program/ kegiatan tersebut dapat dilaksanakan dengan sasaran dan target yang jelas dan mengacu kepada RPJMD Kabupaten Tapin dan Renstra Inspektorat;
2. Agar program/kegiatan tiap tahun dapat dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan;
3. Lebih meningkatkan akuntabilitas dan efektifitas unit kerja melalui perencanaan yang bertanggung jawab;
4. Meningkatkan efektifitas dan produktifitas unit kerja melalui pemanfaatan kemampuan sumberdaya aparatur secara maksimal dan terukur tingkat capaian kinerja.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Perubahan Inspektorat Kabupaten Tapin tahun 2025 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Antara lain memuat/menjelaskan maksud, tujuan, dan dasar pertimbangan perubahan yang disertai dengan gambaran tentang perubahan kerangka pengawasan daerah.



BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD

Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Tahun 2024 sampai dengan 2025 Triwulan II

BAB III TUJUAN, SASARAN OPD

Bab ini telaahan terhadap kebijakan pembangunan berdasarkan strategi dengan target capaian indikator kinerja, yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan, tujuan dan sasaran Renja Perubahan SKPD

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Berisi tentang: Program beserta indikator keberhasilan program serta penjelasan kegiatan beserta output dan outcome yang diinginkan.

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa: catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.



BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA

PERANGKAT DAERAH

Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2025:

Evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Renja Inspektorat sampai dengan Triwulan II Tahun 2025, berdasarkan realisasi target kinerja keluaran dari kegiatan yang dilaksanakan serta capaian dari target program/kegiatan. Adapun tabel evaluasi pelaksanaan Renja SKPD dapat dilihat pada tabel di bawah.



FORMULIR EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA SKPD KABUPATEN/KOTA
Renja SKPD Inspektorat Kabupaten Tapin
Triwulan IV Tahun 2024

No	Kode Anggaran	Usuan/Bidang Usuan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome / Kegiatan output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2024)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2024)				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2024				Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024				Unit SKPD Penang- gung jawab		Ket		
				5	Rp	7	Rp	8	Rp	9	Rp	10	Rp	11	Rp	12 = 8+9+10+11	K	Rp	13 = 10/8 x 100	K	Rp	14 = 6+12	K	Rp	15 = 14/6 x 100	16	17									
6	01			URUSAN PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN																																
6	01			INSPEKTORAT DAERAH																																
6	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Level Kapabilitas APIP	3	Level	16.732.077.627	3	Level	16.732.077.627		Level	2.668.144.444		7.073.242.123			10.049.364.960	3	Level	13.652.197.022	3,00	Level	13.652.197.022	100,00	81,59	3,00	Level	13.652.197.022	100,00	81,59	Sekr				
				Indeks kepuasan pelayanan sekretariat	82	Nilai		82	Nilai			Nilai					80,9	Nilai		80,90	Nilai		98,66		80,90	Nilai		98,66			Sekr					
				Persentase APIP yang sesuai kompetensi	100	%		100	%		100	%			100	%				100	%		100,00		100	%			100,00			Sekr				
				Nilai SAKIP Inspektorat	BB	Kategori		BB	Kategori			A	Kategori								A	Kategori		100,00		A	Kategori			100,00			Sekr			
6	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang dibuat tepat waktu	100	%	4.212.000	100	%	4.212.000	100	%					1.884.650				2.802.150	100,00	%		2.802.150	100,00	66,53	100,00	%		2.802.150	100,00	66,53	Perencanaan	
6	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan	2	Dok	656.000	2	Dok	656.000		Dok				1	Dok	384.600	1	Dok	384.600	2,00	Dok	384.600	100,00	58,63	2,00	Dok	384.600	100,00	58,63	Perencanaan		
6	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA	1	Dok	656.000	1	Dok	656.000		Dok				1	Dok	435.350			435.350	1,00	Dok	435.350	100,00	66,36	1,00	Dok	435.350	100,00	66,36	Perencanaan		
6	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA Perubahan	1	Dok	656.000	1	Dok	656.000		Dok					1	Dok		610.000	1,00	Dok	610.000	100,00	92,99	1,00	Dok	610.000	100,00	92,99	Perencanaan			
6	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA	1	Dok	396.000	1	Dok	396.000		Dok				1	Dok	187.200			187.200	1,00	Dok	187.200	100,00	47,27	1,00	Dok	187.200	100,00	47,27	Perencanaan		
6	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA Perubahan	1	Dok	396.000	1	Dok	396.000		Dok				1	Dok	183.000			320.500	1,00	Dok	320.500	100,00	80,93	1,00	Dok	320.500	100,00	80,93	Perencanaan		
6	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja	2	Lap	856.000	2	Lap	856.000	1	Lap				2	Lap	519.000			519.000	2,00	Lap	519.000	100,00	60,63	2,00	Lap	519.000	100,00	60,63	Perencanaan		
6	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja	4	Lap	596.000	4	Lap	596.000	1	Lap		1	Lap		1	Lap	175.500	1	Lap	345.500	4,00	Lap	345.500	100,00	57,97	4,00	Lap	345.500	100,00	57,97	Perencanaan	
Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)																				100,00				66,53								100,00		66,53		
Predikat Kinerja Sub Kegiatan																				ST				S								ST		S		
6	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	100	%	8.960.150.558	100	%	8.960.150.558	100	%	2.169.246.307	100	%	4.992.805.879	100	%	6.843.446.665	100	%	8.442.761.991	100	%	8.442.761.991	100,00	94,23	100,00	%		8.442.761.991	100,00	94,23	Adum	
6	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	38	Org	8.837.168.558	38	Org	8.837.168.558	38	Org	2.153.946.307	38	Org	4.955.305.879	38	Org	6.764.852.965	38	Org	8.361.228.791	38	Org	8.361.228.791	100,00	94,61	38,00	Org	8.361.228.791	100,00	94,61	Adum	
6	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	12	Dok	109.930.000	12	Dok	109.930.000	3	Dok	15.300.000	6	Dok	37.500.000	9	Dok	69.324.300	12	Dok	69.324.300	12	Dok	69.324.300	100,00	63,06	12,00	Dok	69.324.300	100,00	63,06	Adum	
6	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan	1	Lap	4.995.000	1	Lap	4.995.000	1	Lap					Lap	4.809.050			4.809.050	1	Lap	4.809.050	100,00	96,28	1,00	Lap	4.809.050	100,00	96,28	Adum		
6	01	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiajan Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1	Dok	3.262.000	1	Dok	3.262.000		Dok					1	Dok	2.939.500	1	Dok	2.939.500	100,00	90,11	1,00	Dok	2.939.500	100,00	90,11	Adum				
6	01	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen pelaporan prognosis keuangan	1	Dok	4.795.000	1	Dok	4.795.000		Dok					1	Dok	4.460.350			4.460.350	100,00	93,02	1,00	Dok	4.460.350	100,00	93,02	Adum				
Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)																				100,00				94,23								100,00		94,23		
Predikat Kinerja Sub Kegiatan																				ST				ST								ST		ST		
6	01	01	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100	%	2.235.200	100	%	2.235.200		%		100	%	445.000	100	%	445.000	100	%	2.211.000	100	%	2.211.000	100,00	98,92	100	%		2.211.000	100,00	98,92	Adum	
6	01	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Lap	2.235.200	1	Lap	2.235.200		Lap		1	Lap	445.000					2.211.000	1	Lap	2.211.000	100,00	98,92	1	Lap	2.211.000	100,00	98,92	Adum		
Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)																				100,00				98,92								100,00		98,92		
Predikat Kinerja Sub Kegiatan																				ST				ST								ST		ST		

6	01	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian tepat waktu	100	%	1.029.722.195	100	%	1.029.722.195	100	%	54.850.000	100	%	177.975.000	00	%	236.450.000	100	%	435.627.100	100	%	435.627.100	100,00	42,31	100	Bln	435.627.100	100,00	42,31	Adum		
6	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakalan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakalan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	38	Paket	72.619.755	38	Paket	72.619.755		Paket						38	Paket	27.000.000	38	Paket	27.000.000	100,00	37,18	38	Paket	27.000.000	100,00	37,18	Adum			
6	01	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	38	Dok	87.278.400	38	Dok	87.278.400	38	Dok	13.800.000	38	Dok	41.400.000	38	Dok	55.500.000	38	Dok	83.897.300	38	Dok	83.897.300	100,00	96,13	38	Dok	83.897.300	100,00	96,13	Adum	
6	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	38	Org	413.682.800	38	Org	413.682.800	7	Org	17.800.000	12	Org	63.975.000	15	Org	75.475.000	38	Org	172.204.800	38	Org	172.204.800	100,00	41,63	38	Org	172.204.800	100,00	41,63	Adum	
6	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	38	Org	456.141.240	38	Org	456.141.240	5	Org	23.250.000	31	Org	72.600.000	32	Org	105.475.000	38	Org	152.525.000	38	Org	152.525.000	100,00	33,44	38	Org	152.525.000	100,00	33,44	Adum	
Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)																												100,00	42,31					100,00	42,31	
Predikat Kinerja Sub Kegiatan																												ST	SR					ST	SR	
6	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran tepat waktu	100	%	4.102.090.660	100	%	4.102.090.660	100	%	388.767.427	100	%	1.731.038.896	100	%	2.703.435.158	100	%	3.017.240.976	100	%	3.017.240.976	100,00	73,55	100,00	%	3.017.240.976	100,00	73,55	Adum		
6	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2	Paket	39.056.100	2	Paket	39.056.100	1	Paket	661.000		Paket	1.453.500		Paket	2.758.500	1	Paket	13.952.100	2	Paket	13.952.100,00	100,00	35,72	2	Paket	13.952.100	100,00	35,72	Adum	
6	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Paket	105.440.100	12	Paket	105.440.100	3	Paket	1.000.000	6	Paket	17.369.887	9	Paket	39.069.637	12	Paket	85.091.979	12	Paket	85.091.979,00	100,00	80,70	12	Paket	85.091.979	100,00	80,70	Adum	
6	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	12	Paket	10.610.100	12	Paket	10.610.100	3	Paket	433.620	6	Paket	4.108.000	9	Paket	4.108.000	12	Paket	8.946.900	12	Paket	8.946.900,00	100,00	84,32	12	Paket	8.946.900	100,00	84,32	Adum	
6	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	Paket	271.589.560	12	Paket	271.589.560	3	Paket	28.683.235	6	Paket	67.149.435	9	Paket	101.140.935	12	Paket	204.718.990	12	Paket	204.718.990,00	100,00	75,38	12	Paket	204.718.990	100,00	75,38	Adum	
6	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	Paket	72.869.000	12	Paket	72.869.000	3	Paket	2.159.500	6	Paket	16.843.900	9	Paket	21.828.650	12	Paket	44.642.300	12	Paket	44.642.300,00	100,00	61,26	12	Paket	44.642.300	100,00	61,26	Adum	
6	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Lap	44.540.000	12	Lap	44.540.000	3	Lap	5.545.200	6	Lap	13.708.900	9	Lap	23.212.900	12	Lap	44.388.000	12	Lap	44.388.000,00	100,00	99,66	12	Lap	44.388.000	100,00	99,66	Adum	
6	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Lap	3.287.865.800	12	Lap	3.287.865.800	3	Lap	175.142.436	6	Lap	805.202.637	9	Lap	1.255.658.268	12	Lap	2.580.481.007	12	Lap	2.580.481.007,00	100,00	78,48	12	Lap	2.580.481.007	100,00	78,48	Adum	
6	01	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12	Dok	270.120.000	12	Dok	270.120.000	3	Lap	175.142.436	6	Lap	805.202.637	9	Lap	1.255.658.268	12	Lap	35.019.700	12	Lap	35.019.700,00	100,00	12,96	12	Lap	35.019.700	100,00	12,96	Adum	
Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)																												100,00	73,55					100,00	73,55	
Predikat Kinerja Sub Kegiatan																												ST	S					ST	S	
6	01	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan BMD sesuai kebutuhan	100	%	1.723.514.756	100	%	1.723.514.756		%							100	%	1.294.274.000	100	%	1.294.274.000,00	100,00	75,10	100	%	1.294.274.000,00	100,00	75,10	Adum			
6	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4	Unit	766.000.000	4	Unit									4	Unit	424.764.000	4	Unit	424.764.000,00	100,00	55,45									
6	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mabel yang disediakan		Paket		0	Paket	-		Paket									Paket	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0	Unit	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	Adum				
6	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit pengadaan peralatan dan mesin lainnya	90	Unit	957.514.756	90	Unit	957.514.756		Unit						90	Unit	869.510.000	90	Unit	869.510.000,00	100,00	90,81	90	Unit	869.510.000,00	100,00	90,81	Adum			
Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)																												100,00	75,10					100,00	75,10	
Predikat Kinerja Sub Kegiatan																												ST	S					ST	S	
6	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu	100	%	265.386.510	100	%	265.386.510	100	%	30.489.283	100	%	72.618.028	100	%	98.403.140	100	%	151.428.145	100	%	151.428.145	100,00	57,06	100	%	151.428.145	100,00	57,06	Adum		
6	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Lap	201.315.010	12	Lap	201.315.010	3	Lap	21.061.603	6	Lap	44.364.148	9	Lap	60.741.020	12	Lap	87.799.545	12	Lap	87.799.545	100,00	43,61	12	Lap	87.799.545	100,00	43,61	Adum	
6	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Lap	64.071.500	12	Lap	64.071.500	3	Lap	9.427.680	6	Lap	28.253.880	9	Lap	37.662.120	12	Lap	63.628.600	12	Lap	63.628.600	100,00	99,31	12	Lap	63.628.600	100,00	99,31	Adum	
Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)																												100,00	57,06					100,00	57,06	
Predikat Kinerja Sub Kegiatan																												ST	R					ST	R	
6	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase aset dalam kondisi baik	100	%	644.765.748	100	%	644.765.748	90,13	%	24.791.427	90,13	%	98.359.320	90,13	%	165.300.347	90,13	%	305.851.660	90,13	%	305.851.660	90,13	47,44	90,13	%	305.851.660	90,13	47,44	Adum		
6	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan	1	Unit	195.081.855	1	Unit	195.081.855	1	Unit	9.364.633	1	Unit	33.131.463	1	Unit	58.155.813	1	Unit	76.582.213	1	Unit	58.155.813	100,00	29,81	12	Unit	58.155.813	12,00	29,81	Adum	
6	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10	Unit	239.896.600	10	Unit	239.896.600	3	Unit	10.176.924	6	Unit	45.619.407	9	Unit	80.169.956	10	Unit	148.432.880	10	Unit	80.169.956	100,00	33,42	10	Unit	80.169.956	10,00	33,42	Adum	
6	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	80	Unit	37.759.201	80	Unit	37.759.201	20	Unit	4.139.870	40	Unit	17.979.450	60	Unit	24.143.578	80	Unit	29.341.867	80	Unit	24.143.578	100,00	63,94	80	Unit	24.143.578	80,00	63,94	Adum	
6	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	172.028.092	1	Unit	172.028.092	1	Unit	1.110.000	1	Unit	1.629.000	1	Unit	2.831.000	1	Unit	51.494.700	1	Unit	2.831.000	100,00	1,65	1	Unit	2.831.000	1,00	1,65	Adum	
Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)																												100,00	47,44					100,00	47,44	
Predikat Kinerja Sub Kegiatan																												ST	SR					ST	SR	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																												98,59	81,59					98,59	81,59	
Predikat Kinerja Kegiatan																												ST	T					ST	T	

6	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Indeks Manajemen Risiko	3	Level	5.048.105.660	3	Level	5.048.105.660						269.730.000							1.066.549.600						1.607.599.600	3	Level	2.889.622.800	3	Level	2.889.622.800	100,00	57,24	3	Level	2.889.622.800	100,00	57,24	Irban	
						Persentase IKK sesuai pedoman	100	%		100	%		100	%																	100	%		100,00		100	%		100,00		Irban					
						Persentase predikat sapik SKPD minimal BB	100	%		100	%		97,77	%																	97,77	%		97,77		97,77	%		97,77		Irban					
						Persentase SKPD yang tidak mendapatkan temuan berulang dari BPK RI	100	%		100	%			%			95,55	%													95,55	%		95,55		95,55	%		95,55		Irban					
						Persentase kematangan manajemen risiko SKPD Minimal Level 3	100	%		100	%			%																100	%		100	%		100,00		100,00	%		100,00		Irban			
						Persentase efektifitas penanganan risiko SKPD	100	%		100	%			%			100	%														100	%		100,00		100,00	%		100,00		Irban				
6	01	02	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase hasil pengawasan yang telah ditindaklanjuti	100	%	3.545.058.930	100	%	3.545.058.930	73,33	%	132.460.000	77,58	%	727.030.000	77,58	%	1.195.770.000	77,58	%	2.087.383.200	77,58	%	2.087.383.200	77,58	58,88	77,58	%	2.087.383.200	77,58	58,88	Irban											
6	01	02	2.01	01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	82	Lap	1.142.005.300	82	Lap	1.142.005.300	3	Lap	14.400.000	13	Lap	243.830.000	33	Lap	511.610.000	82	Lap	980.338.200	82	Lap	980.338.200	100,00	85,84	3	Lap	980.338.200	100,00	85,84	Irban											
6	01	02	2.01	02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	40	Lap	686.989.350	40	Lap	686.989.350	6	Lap	18.220.000	14	Lap	129.480.000	36	Lap	254.200.000	40	Lap	504.500.000	40	Lap	504.500.000	100,00	73,44	40	Lap	504.500.000	100,00	73,44	Irban											
6	01	02	2.01	03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	12	Lap	427.271.830	12	Lap	427.271.830	6	Lap		8	Lap	92.990.000	10	Lap	120.530.000	12	Lap	172.650.000	12	Lap	172.650.000	100,00	40,41	12	Lap	172.650.000	100,00	40,41	Irban											
6	01	02	2.01	04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	2	Lap	160.460.280	2	Lap	160.460.280		Lap		1	Lap	6.000.000	1	Lap	6.000.000		Lap	24.540.000	2	Lap	24.540.000	100,00	15,29	2	Lap	24.540.000	100,00	15,29	Irban											
6	01	02	2.01	05	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	32	Lap	668.075.240	32	Lap	668.075.240	14	Lap	89.040.000	14	Lap	161.455.000	19	Lap	161.455.000	32	Lap	171.705.000	32	Lap	171.705.000	100,00	25,70	32	Lap	171.705.000	100,00	25,70	Irban											
6	01	02	2.01	07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APUP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APUP	85	Dok	460.256.930	85	Dok	460.256.930	19	Dok	10.800.000	40	Dok	93.275.000	59	Dok	141.975.000	83	Lap	233.650.000	83	Dok	233.650.000	97,65	50,77	83	Dok	233.650.000	97,65	50,77	Evlap											
Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)																												99,61		58,88				99,61		58,88										
Predikat Kinerja Sub Kegiatan																												ST		R				ST		R										
6	01	02	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Laporan Hasil Pemeriksaan Aduan Masyarakat Yang Ditangani Tepat Waktu	100	%	1.503.046.730	100	%	1.503.046.730	100	%	137.270.000	100	%	339.519.600	100	%	411.829.600			802.239.600	100	%	802.239.600	100,00	53,37	100,00	%	802.239.600	100,00	53,37	Irban											
6	01	02	2.02	01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	1	Lap	307.702.730	3	Lap	307.702.730		Lap		1	Lap	6.429.600	1	Lap	6.429.600	1	Lap	9.229.600	3	Lap	9.229.600	100,00	3,00		Lap	9.229.600	100,00	3,00	Irban											
6	01	02	2.02	02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	20	Lap	1.195.344.000	20	Lap	1.195.344.000	1	Lap	137.270.000	11	Lap	333.090.000	17	Lap	405.400.000	19	Lap	793.010.000	19	Lap	793.010.000	95,00	66,34	19	Lap	793.010.000	95,00	66,34	Irban											
Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)																												97,50		53,37				97,50		53,37										
Predikat Kinerja Sub Kegiatan																												ST		R				ST		R										
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																												98,88		57,24				98,88		57,24										
Predikat Kinerja Kegiatan																												ST		R				ST		R										

6		01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	3	Level	1.548.080.610	3	Level	1.548.080.610		Level		456.000			64.888.500				128.867.500	2,652	Level		568.513.600	2,652	Level		568.513.600	88,40	36,72	2,652	Level		568.513.600	88,40	36,72	Irban					
							Persentase entitas yang diperiksa tidak terdapat temuan materil	100	%		100	%			%			68,88	%						68,88	%						68,88	%			68,88	%			68,88	%		Irban			
							Persentase SKPD yang telah menerapkan mitigasi risiko fraud	100	%		100	%			%														100	%			100	%			100,00		100	%			100,00		Irban	
6	01	03		2.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	Persentase Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum	100	%	29.446.770	100	%	29.446.770		%										100	%		4.595.700	100	Level		4.595.700	100,00	15,61	100	Level		4.595.700	100,00	15,61	Sekretaris					
6	01	03	2.01	01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	1	Rekomendasi	27.246.020	1	Rekomendasi	27.246.020		Rekomendasi										1	Rekomendasi		2.425.450	1	Rekomendasi		2.425.450	100,00	8,90	1	Rekomendasi		2.425.450	100,00	8,90	Evlap					
6	01	03	2.01	02		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan yang Disusun	1	Rekomendasi	2.200.750	1	Rekomendasi	2.200.750		Rekomendasi										1	Rekomendasi		2.170.250	1	Rekomendasi		2.170.250	100,00	98,61	1	Rekomendasi		2.170.250	100,00	98,61	TU					
Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)																												100,00	15,61					100,00	15,61											
Predikat Kinerja Sub Kegiatan																												ST	SR					ST	SR											
6	01	03	2.02			Pendampingan dan Asistensi	Persentase hasil Pendampingan dan Asistensi yang telah ditindaklanjuti	100	%	1.518.633.840	100	%	1.518.633.840		%		456.000	100	%	64.888.500			128.867.500				563.917.900	100	%		563.917.900	100,00	37,13	100	%		563.917.900	100	37,13	Irban						
6	01	03	2.02	01		Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	12	Perangkat Daerah	60.529.060	12	Perangkat Daerah	60.529.060		Perangkat Daerah			Perangkat Daerah					12	Perangkat Daerah		12.000.000	12	Perangkat Daerah		12.000.000	100,00	19,83	12	Perangkat Daerah		12.000.000	100,00	19,83	Irban							
6	01	03	2.02	02		Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	18	Perangkat Daerah	496.338.820	18	Perangkat Daerah	496.338.820		Perangkat Daerah			Perangkat Daerah	18	Perangkat Daerah	3.600.000		18	Perangkat Daerah		11.150.000	18	Perangkat Daerah		11.150.000	100,00	2,25	18	Perangkat Daerah		11.150.000	100,00	2,25	Irban							
6	01	03	2.02	03		Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	5	Keg	881.468.000	5	Keg	881.468.000	1	Keg		456.000	2	Keg	60348000	3	Keg	120.727.000	5	Keg		510.597.400	5	Keg		510.597.400	100,00	57,93	5	Keg		510.597.400	100,00	57,93	Irban						
6	01	03	2.02	04		Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	6	Perangkat Daerah	80.297.960	6	Perangkat Daerah	80.297.960		Perangkat Daerah			Perangkat Daerah	6	Perangkat Daerah	4540500			Perangkat Daerah		4.540.500		Perangkat Daerah		30.170.500	6	Perangkat Daerah		30.170.500	100,00	37,57	6	Perangkat Daerah		30.170.500	100,00	37,57	Irban			
Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)																												100,00	37,13					100,00	37,13											
Predikat Kinerja Sub Kegiatan																												ST	SR					ST	SR											
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																												85,76	36,72					85,76	36,72											
Predikat Kinerja Kegiatan																												T	SR					T	SR											
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										23.328.263.897			2.938.330.444			8.204.680.223			11.785.832.060			17.108.122.422			17.110.323.422			96,00	73,35					96,00	73,35											
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM DAN ANGGARAN (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 3)																												ST	S					ST	S											
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 3)																																														

FORMULIR EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA SKPD KABUPATEN/KOTA Renja SKPD Inspektorat Kabupaten Tapin Triwulan II Tahun 2025																																		
No	Kode Anggaran				Ususan/Bidang Ususan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2024			Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024			Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2024				Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024		Unit SKPD Penang-gung jawab	Ket.		
													I		II		III		IV															
1	2				3	4	5		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 127 x 100		14 = 6+12		15 = 145 x 100		16	17						
6					URUSAN PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN																													
6	01				INSPEKTORAT DAERAH																													
6	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Level Kapabilitas APIP	3	Level	17.519.185.383	3	Level	17.519.185.383		Level	2.856.310.709		6.431.526.749						Level	6.431.526.749	0,00	36,71	0,00	Level	6.431.526.749	0,00	36,71	Sekr			
					Indeks kepuasan pelayanan sekretariat	85	Nilai		85	Nilai		Nilai									Nilai		0,00		Nilai		0,00			Sekr				
					Persentase APIP yang sesuai kompetensi	100	%		100	%		100	%		100	%						100	%		100,00		100	%		100,00			Sekr	
					Nilai SAKIP Inspektorat	A	Kategori		A	Kategori		Kategori									Kategori				Kategori					Kategori			Sekr	
6	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang dibuat tepat waktu	100	%	3.540.800	100	%	3.540.800	100	%								%	-	0,00	0,00	0,00	%	-	0,00	-	Perencanaan				
6	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan	2	Dok	572.800	2	Dok	572.800		Dok							0,00	Dok	-	0,00	0,00	0,00	Dok	-	0,00	-	Perencanaan			
6	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA	1	Dok	558.000	1	Dok	558.000		Dok							0,00	Dok	-	0,00	0,00	0,00	Dok	-	0,00	-	Perencanaan			
6	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA Perubahan	1	Dok	558.000	1	Dok	558.000		Dok							0,00	Dok	-	0,00	0,00	0,00	Dok	-	0,00	-	Perencanaan			
6	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA	1	Dok	298.000	1	Dok	298.000		Dok							0,00	Dok	-	0,00	0,00	0,00	Dok	-	0,00	-	Perencanaan			
6	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA Perubahan	1	Dok	298.000	1	Dok	298.000		Dok							0,00	Dok	-	0,00	0,00	0,00	Dok	-	0,00	-	Perencanaan			
6	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja	2	Lap	758.000	2	Lap	758.000		Lap								Lap	-	0,00	0,00	0,00	Lap	-	0,00	-	Perencanaan			
6	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja	4	Lap	498.000	4	Lap	498.000		Lap							0,00	Lap	-	0,00	0,00	0,00	Lap	-	0,00	-	Perencanaan			
																					Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)		0,00	0,00					0,00	0,00				
																					Predikat Kinerja Sub Kegiatan		SR	SR					SR	SR				
6	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	100	%	10.690.257.795	100	%	10.690.257.795	100	%	2.312.301.724	100	%	5.420.279.717				100	%	5.420.279.717	100,00	50,70	100,00	Bin	5.420.279.717	100,00	50,70	Adum			
6	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	38	Org	10.573.667.795	38	Org	10.573.667.795	38	Org	2.302.401.724	38	Org	5.399.593.717				38	Org	5.399.593.717	100,00	51,07	38,00	Org	5.399.593.717	100,00	51,07	Adum		
6	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	12	Dok	106.400.000	12	Dok	106.400.000		3	Dok	6.600.000	6	Dok	16.500.000				6	Dok	16.500.000	50,00	15,51	6,00	Dok	16.500.000	50,00	15,51	Adum	
6	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan	1	Lap	5.195.000	1	Lap	5.195.000		1	Lap	3.300.000	1	Lap	4.186.000				1	Lap	4.186.000	100,00	80,58	1,00	Lap	4.186.000	100,00	80,58	Adum	
6	01	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen pelaporan prognosis keuangan	1	Dok	4.995.000	1	Dok	4.995.000		Dok							0	Dok	-	0,00	0,00	0,00	Dok	-	0,00	0,00	Adum			
																					Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)		83,33	50,70					83,33	50,70				
																					Predikat Kinerja Sub Kegiatan		T	SR					T	SR				
6	01	01	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100	%	3.247.200	100	%	3.247.200		%								%	-	0,00	0,00	0	%	-	0,00	0,00	Adum				
6	01	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Lap	3.247.200	1	Lap	3.247.200		Lap								Lap	-	0,00	0,00	0	Lap	-	0,00	0,00	Adum			
																					Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)		0,00	0,00					0,00	0,00				
																					Predikat Kinerja Sub Kegiatan		SR	SR					SR	SR				

6	01	01	2.05	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawalan tepat waktu	100	%	3.923.075.340	100	%	3.923.075.340	100	%	111.800.000	100	%	189.486.500													100	%	189.486.500	100,00	4,83	100	Bln	189.486.500	100,00	4,83	Adum			
6	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakalan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakalan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	38	Paket	86.873.500	38	Paket	86.873.500		Paket																	Paket		0,00	0,00	0	Paket	-	0,00	0,00	Adum			
6	01	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	38	Dok	83.678.400	38	Dok	83.678.400	38	Dok	13.800.000	38	Dok	34.500.000												38	Dok	34.500.000	100,00	41,23	38	Dok	34.500.000	100,00	41,23	Adum			
6	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	38	Org	2.434.845.700	38	Org	2.434.845.700	8	Org	68.200.000	27	Org	123.610.000												27	Org	123.610.000	71,05	5,08	27	Org	123.610.000	71,05	5,08	Adum			
6	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	38	Org	1.317.677.740	38	Org	1.317.677.740	4	Org	29.800.000	5	Org	31.376.500												5	Org	31.376.500	13,16	2,38	5	Org	31.376.500	13,16	2,38	Adum			
																												Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)		46,05	4,83					46,05	4,83						
																												Predikat Kinerja Sub Kegiatan		SR	SR					SR	SR						
6	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran tepat waktu	100	%	1.994.893.590	100	%	1.994.893.590	100	%	392.517.527	100	%	708.717.832													100	%	708.717.832,00	100,00	35,53	100,00	%	708.717.832	100,00	35,53	Adum			
6	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2	Paket	34.615.400	2	Paket	34.615.400		Paket		1	Paket	9.315.000												1	Paket	9.315.000	50,00	26,91	1	Paket	9.315.000	50,00	26,91	Adum			
6	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Paket	103.921.600	12	Paket	103.921.600	3	Paket	850.000	6	Paket	27.404.422												6	Paket	27.404.422	50,00	26,37	6	Paket	27.404.422	50,00	26,37	Adum			
6	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	12	Paket	9.908.900	12	Paket	9.908.900	3	Paket	809.500	6	Paket	7.930.620												6	Paket	7.930.620	50,00	80,04	6	Paket	7.930.620	50,00	80,04	Adum			
6	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	Paket	618.749.540	12	Paket	618.749.540	3	Paket	25.200.000	6	Paket	55.727.865												6	Paket	55.727.865	50,00	9,01	6	Paket	55.727.865	50,00	9,01	Adum			
6	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	Paket	60.953.200	12	Paket	60.953.200	3	Paket	5.900.050	6	Paket	12.411.400												6	Paket	12.411.400	50,00	20,36	6	Paket	12.411.400	50,00	20,36	Adum			
6	01	01	2.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12	Lap	61.054.300	12	Lap	61.054.300	3	Lap	5.224.300	6	Lap	16.545.300												6	Lap	16.545.300	50,00	27,10	6	Lap	16.545.300	50,00	27,10	Adum			
6	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Lap	1.105.690.650	12	Lap	1.105.690.650	3	Lap	354.533.677	6	Lap	579.383.225												6	Lap	579.383.225	50,00	52,40	6	Lap	579.383.225	50,00	52,40	Adum			
																												Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)		50,00	35,53					50,00	35,53						
																												Predikat Kinerja Sub Kegiatan		SR	SR					SR	SR						
6	01	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan BMD sesuai kebutuhan	100	%	204.275.360	100	%	204.275.360		%																0	%	0,00	0,00	0,00	0	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Adum		
6	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	65	Paket	161.643.860	65	Paket	161.643.860		Paket																	Paket	0,00	0,00	0,00	0	Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Adum	
6	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit pengadaan peralatan dan mesin lainnya	15	Unit	42.631.500	15	Unit	42.631.500		Unit																	Unit	0,00	0,00	0,00	0	Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Adum	
																												Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)		0,00	0,00					0,00	0,00						
																												Predikat Kinerja Sub Kegiatan		SR	SR					SR	SR						
6	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu	100	%	236.252.180	100	%	236.252.180	100	%	19.573.360	100	%	51.139.424													100	%	51.139.424	100,00	21,65	100	%	51.139.424	100,00	21,65	Adum			
6	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Lap	154.080.680	12	Lap	154.080.680	3	Lap	9.961.000	6	Lap	27.822.944												6	Lap	27.822.944	50,00	18,06	6	Lap	27.822.944	50,00	18,06	Adum			
6	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Lap	82.171.500	12	Lap	82.171.500	3	Lap	9.612.360	6	Lap	23.316.480												6	Lap	23.316.480	50,00	28,38	6	Lap	23.316.480	50,00	28,38	Adum			
																												Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)		50,00	21,65					50,00	21,65						
																												Predikat Kinerja Sub Kegiatan		SR	SR					SR	SR						
6	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase aset dalam kondisi baik	100	%	463.643.118	100	%	463.643.118	90,13	%	20.118.098	88,54	%	61.903.276													88,54	%	61.903.276	88,54	13,35	88,54	%	61.903.276	88,54	13,35	Adum			
6	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	Unit	108.753.550	1	Unit	108753550	1	Unit	1.803.925	1	Unit	7.234.103												1	Unit	7.234.103	100,00	6,65	1	Unit	7.234.103	100,00	6,65	Adum			
6	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10	Unit	217.791.800	10	Unit	217.791.800	2	Unit	4.435.053	3	Unit	5.415.053												3	Unit	5.415.053	30,00	2,49	3	Unit	5.415.053	3,00	2,49	Adum			
6	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	80	Unit	51.606.568	80	Unit	51.606.568	10	Unit	2.152.120	25	Unit	16.809.120												25	Unit	16.809.120	31,25	32,57	25	Unit	16.809.120	25,00	32,57	Adum			
6	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	85.491.200	1	Unit	85.491.200	1	Unit	11.727.000	1	Unit	32.445.000												1	Unit	32.445.000	100,00	37,95	1	Unit	32.445.000	1,00	37,95	Adum			
																												Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)		65,31	13,35					65,31	13,35						
																												Predikat Kinerja Sub Kegiatan		R	SR					R	SR						
																												Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)		73,76	36,71					73,76	36,71						
																												Predikat Kinerja Kegiatan		S	SR					S	SR						

6	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Nilai Penjamin Kualitas SPJP	4,000	Level	5.497.041.270	4,000	Level	5.497.041.270		Level	232.392.000		Level	1.064.047.000									0	Level	232.392.000		4,23	0	Level	232.392.000	0,00	4,23	Irban				
						Persentase IKK sesuai pedoman	100	%		100	%		100	%																100	%		100,00		100	%		100,00		Irban	
						Persentase predikat saki SKPD minimal A	100	%		100	%			%																	%		0,00		0	%		0,00		Irban	
						Persentase SKPD yang telah menyusun RTP/ Risk Register Strategis dan Operasional	100	%		100	%		100	%																100	%		100,00		100	%		100,00		Irban	
						Persentase komponen laporan keuangan yang disajikan sesuai SAP	100	%		100	%		100	%																	100	%		100,00		100	%		100,00		Irban
6	01	02	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase hasil pengawasan yang telah ditindaklanjuti	100	%	4.354.317.340	100	%	4.354.317.340	77,58	%	171.960.000	88,23	%	838.895.000									88,23	%	838.895.000	88,23	19,27	88,23	%	838.895.000	88,23	19,27	Irban				
6	01	02	2.01	01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	82	Lap	1.574.994.260	82	Lap	1.574.994.260	11	Lap	75.440.000	23	Lap	335.890.000									23	Lap	335.890.000	28,05	21,33	11	Lap	335.890.000	28,05	21,33	Irban				
6	01	02	2.01	02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	40	Lap	734.636.950	40	Lap	734.636.950	8	Lap	74.250.000	16	Lap	181.400.000									16	Lap	181.400.000	40,00	24,69	16	Lap	181.400.000	40,00	24,69	Irban				
6	01	02	2.01	03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	47	Lap	469.911.830	47	Lap	469.911.830		Lap		1	Lap	16.100.000									1	Lap	16.100.000	2,13	3,43	1	Lap	16.100.000	2,13	3,43	Irban				
6	01	02	2.01	04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	2	Lap	226.600.280	2	Lap	226.600.280		Lap		1	Lap	34.200.000									1	Lap	34.200.000	50,00	15,09	1	Lap	34.200.000	50,00	15,09	Irban				
6	01	02	2.01	05	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	32	Lap	750.783.690	32	Lap	750.783.690		Lap		6	Lap	111.820.000									6	Lap	111.820.000	18,75	14,89	6	Lap	111.820.000	18,75	14,89	Irban				
6	01	02	2.01	07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APJP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APJP	48	Dok	597.390.330	48	Dok	597.390.330	14	Dok	22.270.000	26	Dok	159.485.000									26	Dok	159.485.000	54,17	26,70	26	Dok	159.485.000	54,17	26,70	Evlap				
Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)																												32,18	19,27				32,18	19,27							
Predikat Kinerja Sub Kegiatan																												SR	SR				SR	SR							
6	01	02	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Laporan Hasil Pemeriksaan Aduan Masyarakat Yang Ditangani Tepat Waktu	100	%	1.142.723.930	100	%	1.142.723.930	100	%	60.432.000	100	%	225.152.000									100	%	225.152.000	100,00	19,70	100	%	225.152.000	100,00	19,70	Irban				
6	01	02	2.02	01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	1	Lap	270.179.930	1	Lap	270.179.930		Lap			Lap											Lap			0,00		Lap	-		0,00	Irban				
6	01	02	2.02	02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	16	Lap	872.544.000	16	Lap	872.544.000	2	Lap	60.432.000	6	Lap	225.152.000									6	Lap	225.152.000	37,50	25,80	6	Lap	225.152.000	37,50	25,80	Irban				
Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)																												37,50	19,70				37,50	19,70							
Predikat Kinerja Sub Kegiatan																												SR	SR				SR	SR							
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																												88,79	4,23				88,79	4,23							
Predikat Kinerja Kegiatan																												T	SR				T	SR							

6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	3	Level	1.710.333.280	3	Level	1.710.333.280		Level	-	Level	158.655.800							Level	-	0,00	0,00	0	Level	-	0,00	0,00	Irban		
						Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pendampingan dan asistensi serta evaluasi pembangunan zona integritas unit pelayanan yang diselesaikan	100	%		100	%			%		100	%							100	%		100,00		100	%		100,00		Irban	
						Persentase tindak lanjut hasil pendampingan dan asistensi serta evaluasi pelaksanaan reformasi yang ditindaklanjuti	100	%		100	%			%		100	%							100	%		100,00		100	%		100,00		Irban	
6	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum	100	%	29.404.020	100	%	29.404.020		%		100	%	5.020.000						100	%	5.020.000	100,00	17,07	100	%	5.020.000	100,00	17,07	Sekretaris	
6	01	03	2.01	01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	1	Rekomendasi	27.246.020	1	Rekomendasi	27.246.020		Rekomendasi		1	Rekomendasi	5.020.000						1	Rekomendasi	5.020.000	100,00	18,42	1	Rekomendasi	5.020.000	100,00	18,42	Evlap	
6	01	03	2.01	02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	1	Rekomendasi	2.158.000	1	Rekomendasi	2.158.000		Rekomendasi			Rekomendasi							Rekomendasi	-		0,00	0	Rekomendasi	-	0,00	0,00	TU		
Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)																								50,00	17,07				50,00	17,07					
Predikat Kinerja Sub Kegiatan																								SR	SR				SR	SR					
6	01	03	2.02		Pendampingan dan Asistensi	Persentase kegiatan pendampingan dan asistensi yang dilaksanakan sesuai rencana	100	%	1.680.929.260	100	%	1.680.929.260		%	-	100	%	153.635.800						100	%	153.635.800	100,00	9,14	100	%	153.635.800	100	9,14	Irban	
6	01	03	2.02	01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	45	Perangkat Daerah	138.593.060	45	Perangkat Daerah	138.593.060		Perangkat Daerah			Perangkat Daerah							Perangkat Daerah			0,00		Perangkat Daerah	0	100,00	0,00	Irban		
6	01	03	2.02	02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	45	Perangkat Daerah	190.032.000	45	Perangkat Daerah	190.032.000		Perangkat Daerah		45	Perangkat Daerah	50.650.000						45	Perangkat Daerah	50.650.000	100,00	26,65	45	Perangkat Daerah	50.650.000	100,00	26,65	Irban	
6	01	03	2.02	03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	5	Keg	1.107.265.200	5	Keg	1.107.265.200		Keg		2	Keg	64.125.800						2	Keg	64.125.800	40,00	5,79	2	Keg	64.125.800	40,00	5,79	Irban	
6	01	03	2.02	04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	3	Perangkat Daerah	245.039.000	3	Perangkat Daerah	245.039.000		Perangkat Daerah		3	Perangkat Daerah	38.860.000						3	Perangkat Daerah	38.860.000		15,86		Perangkat Daerah	38.860.000		15,86	Irban	
Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)																								70,00	9,14				70,00	9,14					
Predikat Kinerja Sub Kegiatan																								S	SR				S	SR					
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																								0,00	0,00				0,00	0,00					
Predikat Kinerja Kegiatan																								SR	SR				SR	SR					
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM									24.726.559.933		3.088.702.709				7.654.229.549				-			-			7.654.229.549										
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM DAN ANGGARAN (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 3)																								50,00	30,96				50,00	30,96					
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 3)																								SR	SR				SR	SR					

Berdasarkan data hasil evaluasi Renja Inspektorat sampai dengan Triwulan II tahun 2025 ada beberapa kegiatan yang masih belum optimal dalam pelaksanaannya namun hal tersebut lebih dipengaruhi oleh pelaksanaan kegiatan yg baru akan dilaksanakan setelah Triwulan II pada tahun berjalan sesuai dengan perencanaan yg telah disusun oleh pelaksana kegiatan.



BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini berisikan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan jangka menengah inspektorat Kabupaten Tapin tahun 2025 yang menyesuaikan dengan rencana strategis inspektorat Kabupaten Tapin tahun 2025-2029 yang merupakan penjabaran visi pembangunan daerah yang aspiratif dan berorientasi pada masa depan untuk mewujudkan rencana pembangunan Kabupaten Tapin yang maju dan beriman. Dalam rangka mencapai visi pembangunan, dirumuskan misi strategis yang akan menjadi panduan dalam setiap langkah pembangunan. Strategi dan kebijakan jangka menengah dapat menunjukkan bagaimana cara perangkat daerah mencapai tujuan, sasaran yang menjadi tugas dan fungsi dari perangkat daerah. Strategi dan kebijakan dalam Renstra 2025-2029 selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan bagi setiap program prioritas tahunan Inspektorat Kabupaten Tapin dengan efektif dan efisien. Strategi digambarkan dalam pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Rumusan kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Penyusunan Renja perubahan Inspektorat Kabupaten Tapin didasarkan pada perumusan tujuan dan sasaran strategis yang merupakan tahapan krusial yang bertujuan untuk memberikan arah kebijakan serta capaian kinerja yang terukur dalam mendukung peningkatan efektivitas pengawasan internal pemerintah daerah. Tujuan dan sasaran dirumuskan berdasarkan analisis visi, misi, tugas pokok dan fungsi, isu strategis, serta hasil evaluasi kinerja periode sebelumnya. Untuk memastikan bahwa tujuan dan sasaran yang ditetapkan relevan, terukur, dan selaras dengan rencana pembangunan daerah serta regulasi nasional, digunakan teknik-teknik perumusan yang sistematis dan berbasis logika perencanaan. Untuk tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan jangka menengah Inspektorat sebagai acuan renja perubahan inspektorat dapat dilihat pada tabel berikut ini:



Visi: “Terwujudnya Tapin Maju dan Beriman (Berintegritas, Sejahtera, Inovatif, Agamis dan Berkelanjutan)”

Misi 5: Mewujudkan Reformasi Birokrasi serta Memberikan Pelayanan Prima Kepada Masyarakat

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Meningkatnya nilai sakiip perangkat daerah	Peningkatan kualitas pendampingan Evaluasi SAKIP, Peningkatan Sinergi atas dan Kolaborasi dengan Bapelitbang dan Bagian Organisasi sebagai bagian dari Tim SAKIP Kabupaten, Pemanfaatan teknologi Informasi dalam Evaluasi Kinerja	Mengedepankan pendekatan edukatif dan konsultatif dalam penerapan SAKIP perangkat daerah, memastikan keselarasan antara RPJMD, Renstra, Renja dan PK, melakukan revaluasi terhadap indikator dan target kinerja agar sesuai dengan kriteria SMART, penguatan SDM Evaluator SAKIP, Monitoring dan Evaluasi berkelanjutan terkait implementasi SAKIP di perangkat daerah, optimalisasi tindak lanjut rekomendasi evaluasi SAKIP
	Meningkatnya kualitas IKK LPPD di Perangkat Daerah	Melakukan evaluasi capaian IKK dan revaluasi LPPD, pelatihan dan sertifikasi APIP dalam revaluasi LPPD, pendampingan dan asistensi teknis dalam penyusunan dokumen dan capaian IKK LPPD, mendorong perangkat daerah melakukan self assessment atas IKK masing-masing, optimalisasi sistem aplikasi untuk pelaporan dan pemantauan capaian kinerja IKK (e-LPPD), meningkatkan sinergi dengan Bagian Pemerintahan dalam memaksimalkan capaian IKK perangkat daerah	Memposisikan APIP sebagai mitra perangkat daerah yang tadinya lebih kepada pengawasan dari aspek kepatuhan beralih ke arah kinerja dan tata kelola, mendorong perangkat daerah membangun sistem pengendalian untuk menjamin pencapaian indikator LPPD, menetapkan prioritas pengawasan pada perangkat daerah dengan capaian IKK yang rendah atau bermasalah, monitoring efektivitas tindak lanjut atas temuan dan rekomendasi dalam revaluasi LPPD



	Meningkatnya kualitas dan pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi	Melakukan monitoring secara berkala terhadap pelaksanaan rencana aksi RB perangkat daerah, memastikan integrasi RB dengan program kerja masing-masing perangkat daerah, peningkatan kapasitas dan kompetensi APIP dalam monitoring dan evaluasi RB, koordinasi dan sinergi baik dengan tim RB maupun stakeholder RB perangkat daerah pengampu indikator RB, mendorong peran serta aktif pimpinan daerah dalam memimpin pelaksanaan RB.	Mendorong percepatan tindak lanjut hasil pengawasan RB sebagai dasar pengambilan keputusan strategis kepala daerah dalam penataan birokrasi.
Meningkatnya birokrasi yang berintegritas	Meningkatnya nilai area pengawasan APIP MCP KPK	Penguatan kompetensi SDM APIP melalui pelatihan teknis, sertifikasi dan pendampingan berkelanjutan, menyusun PKPT yang selaras dengan risiko strategis daerah dan prioritas pengawasan KPK, memastikan pelaksanaan audit, revidi, evaluasi dan pemantauan dilakukan secara tepat sasaran dan berdampak, mengoptimalkan koordinasi dengan perangkat daerah untuk menindaklanjuti hasil audit internal dan eksternal, menjalin kerja sama dengan APIP lain, BPKP dan KPK untuk penguatan pengawasan tematik dan pencegahan korupsi.	Mendorong perbaikan kualitas LHP yang sesuai standar, menguatkan mekanisme pelaporan capaian pengawasan secara berkala, berbasis data valid dan update, menyusun laporan evaluasi area MCP yang memuat capaian dan rekomendasi perbaikan tiap triwulan, meningkatkan koordinasi dengan perangkat daerah terkait implementasi area MCP.
	Meningkatnya nilai penjamin kualitas maturitas SPIP	Melaksanakan revidi atas pelaksanaan SPIP perangkat daerah secara berkala, mendorong perangkat daerah	Penguatan fungsi assurance dan consulting APIP terhadap implementasi SPIP, mendorong kemandirian



		menyusun dan mengimplementasikan rencana tindak lanjut atas hasil evaluasi SPIP, menyediakan asistensi teknis dan pendampingan pelaksanaan SPIP di perangkat daerah, menjalin koordinasi dengan BPKP dalam penilaian maturitas SPIP dan pembinaan teknis, mengembangkan sinergi antara perangkat daerah, inspektorat dan tim SPIP Kabupaten.	OPD dalam melakukan penilaian dan peningkatan pengendalian intern, meningkatkan mutu pelaporan maturitas SPIP sesuai pedoman BPKP, memastikan SDM cukup untuk pelaksanaan evaluasi dan pendampingan SPIP, menjadikan hasil penilaian risiko dan SPIP sebagai dasar dalam penyusunan PKPT.
	Meningkatnya penyusunan kebijakan anti korupsi	Meningkatkan kompetensi dan kapabilitas APIP dalam mengawal penyusunan dan implementasi kebijakan anti korupsi, Membangun sinergi antara Inspektorat, OPD, KPK, BPKP, dan lembaga terkait untuk mendukung harmonisasi dan integrasi kebijakan anti korupsi,	Menyusun pedoman teknis dan indikator kinerja penyusunan kebijakan anti korupsi agar selaras dengan rencana aksi nasional maupun instrumen pengawasan seperti MCP KPK, Melaksanakan sosialisasi, pelatihan, dan kampanye antikorupsi untuk memperkuat pemahaman dan komitmen ASN dalam mendukung kebijakan pencegahan korupsi.



BAB IV

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

Program/kegiatan dan kebutuhan pendanaan disusun untuk tahun yang direncanakan disertai dengan prakiraan maju sebagai implikasi kebutuhan dana.

Sementara itu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pasal 13 (2) menyebutkan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Adapun Tabel Rencana program dan kegiatan pada perubahan renja SKPD Inspektorat Tahun 2025 sebagai berikut:



PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH INSPEKTORAT KAB. TAPIN TAHUN 2025																					
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		INSPEKTORAT								17.171.780.857,00	25.673.620.433,00	24.736.559.933,00	7.564.779.076,00							17.178.518.857,00	
	6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN							17.171.780.857,00	25.673.620.433,00	24.736.559.933,00	7.564.779.076,00							17.178.518.857,00		
	6.01	INSPEKTORAT DAERAH							17.171.780.857,00	25.673.620.433,00	24.736.559.933,00	7.564.779.076,00							17.178.518.857,00		
1.	6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Level Kapabilitas APIP				-	3 Nilai	12.457.213.487,00	18.466.245.883,00	17.583.595.383,00	-838.771.030,00							11.618.442.457,00		
	6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang dibuat tepat waktu				-	100 %	3.540.800,00	3.540.800,00	3.540.800,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan	ASN		4.212.000,00	INSPEKTORAT	
	6.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	572.800,00	572.800,00	572.800,00	0,00	Kab. Tapin, Tapin Utara, Rantau Kiwa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan			656.000,00	INSPEKTORAT	
	6.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																			
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	558.000,00	558.000,00	558.000,00	0,00	Kab. Tapin, Tapin Utara, Rantau Kiwa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan			656.000,00	INSPEKTORAT	
	6.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																			
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	558.000,00	558.000,00	558.000,00	0,00	Kab. Tapin, Tapin Utara, Rantau Kiwa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan			656.000,00	INSPEKTORAT	
	6.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																			
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	298.000,00	298.000,00	298.000,00	0,00	Kab. Tapin, Tapin Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan			396.000,00	INSPEKTORAT	
	6.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																			
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	298.000,00	298.000,00	298.000,00	0,00	Kab. Tapin, Tapin Utara, Rantau Kiwa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan			396.000,00	INSPEKTORAT	
	6.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																			
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	758.000,00	758.000,00	758.000,00	0,00	Kab. Tapin, Tapin Utara, Rantau Kiwa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan			856.000,00	INSPEKTORAT	
	6.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	498.000,00	498.000,00	498.000,00	0,00	Kab. Tapin, Tapin Utara, Rantau Kiwa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan			596.000,00	INSPEKTORAT	
	6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN tepat waktu				-	100 %	8.919.791.356,00	10.690.211.295,00	10.690.264.103,00	1.770.472.747,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan	ASN		8.309.901.256,00	INSPEKTORAT	
	6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				39 Orang/bulan	39 Orang/bulan	8.800.071.356,00	10.573.621.295,00	10.573.674.103,00	1.773.602.747,00	Kab. Tapin, Tapin Utara, Rantau Kiwa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan			8.190.181.256,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>				12 Dokumen	12 Dokumen	109.930.000,00	106.400.000,00	106.400.000,00	-3.530.000,00	Kab. Tapin, Tapin Utara, Rantau Kiwa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan			109.930.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>				1 Laporan	1 Laporan	4.995.000,00	5.195.000,00	5.195.000,00	200.000,00	Kab. Tapin, Tapin Utara, Rantau Kiwa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan			4.995.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			<i>Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	4.795.000,00	4.995.000,00	4.995.000,00	200.000,00	Kab. Tapin, Tapin Utara, Rantau Kiwa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan			4.795.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	<i>Persentase pemenuhan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>				-	100 %	2.235.200,00	3.247.200,00	3.247.200,00	1.012.000,00			-	Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan	ASN		2.235.200,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			<i>Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>				1 Laporan	1 Laporan	2.235.200,00	3.247.200,00	3.247.200,00	1.012.000,00	Kab. Tapin, Tapin Utara, Rantau Kiwa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan			2.235.200,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Persentase pelayanan administrasi kepegawaian tepat waktu</i>				-	100 %	761.510.240,00	3.923.075.340,00	1.645.957.540,00	884.447.300,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan	ASN		585.468.340,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>				60 Paket	60 Paket	22.855.000,00	86.873.500,00	86.873.500,00	64.018.500,00	Kab. Tapin, Tapin Utara, Rantau Kiwa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan			29.711.500,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			<i>Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai</i>				40 Dokumen	40 Dokumen	83.678.400,00	83.678.400,00	83.678.400,00	0,00	Kab. Tapin, Tapin Utara, Rantau Kiwa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan			87.278.400,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>				37 Orang	37 Orang	311.932.200,00	2.434.845.700,00	1.089.687.900,00	777.755.700,00	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan			196.332.200,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>				40 Orang	40 Orang	343.044.640,00	1.317.677.740,00	385.717.740,00	42.673.100,00	Kab. Tapin, Tapin Utara, Rantau Kiwa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan			272.146.240,00	INSPEKTORAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran tepat waktu				-	100 %	1.891.554.750,00	2.942.000.590,00	3.585.918.090,00	1.694.363.340,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan	ASN		1.881.910.600,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	39.056.100,00	34.615.400,00	65.315.400,00	26.259.300,00	Kab. Tapin, Tapin Utara, Rantau Kiwa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan			39.056.100,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	105.440.100,00	103.921.600,00	115.021.600,00	9.581.500,00	Kab. Tapin, Tapin Utara, Rantau Kiwa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan			105.440.100,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	9.042.800,00	9.908.900,00	65.208.500,00	56.165.700,00	Kab. Tapin, Tapin Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan			9.042.800,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	214.412.200,00	618.749.540,00	590.241.540,00	375.829.340,00	Kab. Tapin, Tapin Utara, Rantau Kiwa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan			214.190.600,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	61.061.200,00	60.953.200,00	73.128.600,00	12.067.400,00	Kab. Tapin, Tapin Utara, Rantau Kiwa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan			57.209.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	44.540.000,00	61.054.300,00	73.743.800,00	29.203.800,00	Kab. Tapin, Tapin Utara, Rantau Kiwa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan			44.540.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	1.418.002.350,00	2.052.797.650,00	2.603.258.650,00	1.185.256.300,00	Kab. Tapin, Tapin Utara, Rantau Kiwa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan			1.412.432.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan BMD sesuai kebutuhan				-	100 %	268.860.160,00	204.275.360,00	492.954.911,00	224.094.751,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan	ASN		243.219.300,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	153.957.100,00	161.643.860,00	294.745.211,00	140.788.111,00	Kab. Tapin, Tapin Utara, Rantau Kiwa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan			143.602.100,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				20 Unit	20 Unit	114.903.060,00	42.631.500,00	198.209.700,00	83.306.640,00	Kab. Tapin, Tapin Utara, Rantau Kiwa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan			99.617.200,00	INSPEKTORAT	
	6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu				-	100 %	291.116.460,00	236.252.180,00	366.251.628,00	75.135.168,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan	ASN		272.888.460,00	INSPEKTORAT	
	6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	212.044.960,00	154.080.680,00	120.267.428,00	-91.777.532,00	Kab. Tapin, Tapin Utara, Rantau Kiwa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan			193.816.960,00	INSPEKTORAT	
	6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	79.071.500,00	82.171.500,00	245.984.200,00	166.912.700,00	Kab. Tapin, Tapin Utara, Rantau Kiwa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan			79.071.500,00	INSPEKTORAT	
	6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik				-	100 %	318.604.521,00	463.643.118,00	795.461.111,00	476.856.590,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan	ASN		318.607.301,00	INSPEKTORAT	
	6.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	96.089.550,00	108.753.550,00	101.697.235,00	5.607.685,00	Kab. Tapin, Tapin Utara, Rantau Kiwa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan			96.089.550,00	INSPEKTORAT	
	6.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 Unit	10 Unit	163.829.600,00	217.791.800,00	163.356.650,00	-472.950,00	Kab. Tapin, Tapin Utara, Rantau Kiwa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan			163.829.600,00	INSPEKTORAT	
	6.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				70 Unit	70 Unit	35.769.651,00	51.606.568,00	51.606.568,00	15.836.917,00	Kab. Tapin, Tapin Utara, Rantau Kiwa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan			35.769.651,00	INSPEKTORAT	
	6.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	22.915.720,00	85.491.200,00	478.800.658,00	455.884.938,00	Kab. Tapin, Tapin Utara, Rantau Kiwa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan			22.918.500,00	INSPEKTORAT	
2.	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Indeks Manajemen Risiko				-	3 Nilai	3.895.594.490,00	5.497.041.270,00	5.624.016.270,00	321.848.980,00							4.217.443.470,00		
	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase pengawasan yang dilaksanakan sesuai standar				-	100 %	2.880.437.340,00	4.354.317.340,00	4.306.952.340,00	1.426.515.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan	Masyarakat dan ASN		2.856.047.540,00	INSPEKTORAT	
	6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah																			
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				82 Laporan	82 Laporan	1.019.884.260,00	1.574.994.260,00	2.282.229.260,00	1.262.345.000,00	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan			855.312.060,00	INSPEKTORAT	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				40 Laporan	40 Laporan	581.726.950,00	734.636.950,00	877.826.950,00	296.100.000,00	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan			733.389.350,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja																		
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja				47 Laporan	47 Laporan	306.521.830,00	469.911.830,00	232.991.830,00	-73.530.000,00	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan			401.051.830,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan																		
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan				2 Laporan	2 Laporan	38.000.280,00	226.600.280,00	79.060.280,00	41.060.000,00	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan			76.210.280,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0005	Pengawasan Desa																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa				47 Laporan	47 Laporan	550.993.690,00	750.783.690,00	237.453.690,00	-313.540.000,00	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan			478.893.690,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP																		
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP				7 Dokumen	7 Dokumen	383.310.330,00	597.390.330,00	597.390.330,00	214.080.000,00	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan			311.190.330,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Laporan Hasil Pemeriksaan Aduan Masyarakat Yang Ditangani Tepat Waktu				-	100 %	1.015.157.150,00	1.142.723.930,00	1.317.063.930,00	301.906.780,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan	Masyarakat dan ASN		1.361.395.930,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah																		
			Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani				1 Laporan	1 Laporan	188.579.930,00	270.179.930,00	221.119.930,00	32.540.000,00	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan			352.281.930,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu				20 Laporan	20 Laporan	826.577.220,00	872.544.000,00	1.095.944.000,00	269.366.780,00	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan			1.009.114.000,00	INSPEKTORAT
3.	6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi				-	3 Nilai	818.972.880,00	1.710.333.280,00	1.528.948.280,00	523.660.050,00							1.342.632.930,00	
	6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum				-	100 %	29.404.020,00	29.404.020,00	29.404.020,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan	ASN		29.446.770,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan																		
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun				1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	27.246.020,00	27.246.020,00	27.246.020,00	0,00	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan			27.246.020,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun</i>				1 Rekom dasi	1 Rekomen dasi	2.158.000,00	2.158.000,00	2.158.000,00	0,00	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan			2.200.750,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	<i>Jumlah SKPD Strategis yang dilakukan pendampingan dan Asistensi</i>				-	24 SKPD	789.568.860,00	1.680.929.260,00	1.499.544.260,00	709.975.400,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan	ASN		1.313.186.160,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah																		
			<i>Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah</i>				13 perangkat daerah	13 perangkat daerah	138.593.060,00	138.593.060,00	138.593.060,00	0,00	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan			177.529.060,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi																		
			<i>Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi</i>				24 perangkat daerah	24 perangkat daerah	114.032.000,00	190.032.000,00	246.532.000,00	132.500.000,00	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan			380.308.820,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi																		
			<i>Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi</i>				5 Kegiatan	5 Kegiatan	458.513.200,00	1.107.265.200,00	855.780.200,00	397.267.000,00	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan			630.556.080,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas																		
			<i>Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas</i>				3 perangkat daerah	3 perangkat daerah	78.430.600,00	245.039.000,00	258.639.000,00	180.208.400,00	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan			124.792.200,00	INSPEKTORAT
			J U M L A H						17.171.780.857,00	25.673.620.433,00	24.736.559.933,00	7.564.779.076,00							17.178.518.857,00	

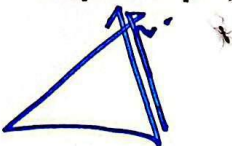
BAB V PENUTUP

Dalam pelaksanaan penyusunan serta penetapan berbagai program dan kegiatan pengawasan ditujukan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berjalan dengan efisien, efektif, bersih serta dapat dipertanggungjawabkan dan produk perencanaan yang diukur berdasarkan sasaran-sasaran pengawasan yang tertuang dalam Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029, program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pengawasan yang tertuang dalam Rencana Kerja Perubahan Inspektorat Tahun 2025 harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas.

Guna memperoleh optimalisasi pencapaian hasil pada pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan Inspektorat, baik dalam kerangka regulasi maupun mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta pembagian urusan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kebijakan, program dan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja Perubahan SKPD Inspektorat ini, kiranya dapat memberi arah bagi kegiatan pengawasan pemerintahan guna terwujudnya good governance yang lebih baik lagi.

Bupati Tapin,



YAMANI

